Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085

Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

PELAKSANAAN PERPRES NO. 63 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN KEPARIWISATAAN PADA PENGELOLAAN KAWASAN WISATA LABUAN BAJO

Andini Sakilla Candra[1], Khalishah Faradilah[2], Amalia Melli Eka Safitri[3], Davina Zulaika Syarifah[4], Katriza Imania[5], Galuh Efnol Adzan[6], Ade Maulidya[7]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Palembang–Prabumulih KM. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

E-mail: 07011182328003@student.unsri.ac.id; 07011182328011@student.unsri.ac.id; 07011282328069@student.unsri.ac.id; 07011282328078@student.unsri.ac.id; katrizaimania@fisip.unsri.ac.id; galuhefnoladzan@gmail.com; ademaulidya1@gmail.com;

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisataan pada pengelolaan kawasan wisata Labuan Bajo melalui studi literatur sistematis terhadap 20 jurnal terpilih. Hasil telaah menunjukkan bahwa meskipun Perpres telah menyediakan kerangka hukum yang jelas, implementasi pengawasan belum optimal karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas pelaksana, belum tersedianya pedoman teknis yang memadai, serta adanya tekanan ekologis di kawasan Taman Nasional Komodo dan pesisir. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berbasis prinsip keberlanjutan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara standar kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola multipihak, integrasi mekanisme pengawasan, dan penerapan pengawasan berbasis konservasi untuk memastikan pengembangan pariwisata Labuan Bajo tetap aman dan berkelanjutan.

Kata kunci: Perpres 63/2014, pengawasan kepariwisataan, Labuan Bajo, implementasi kebijakan, pariwisata berkelanjutan.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Presidential Regulation No. 63 of 2014 on Tourism Supervision in the management of the Labuan Bajo tourism area through a systematic literature review of 20 selected journals. The findings indicate that although the regulation provides a clear legal framework, its implementation remains suboptimal due to weak inter-agency coordination, limited institutional capacity, the absence of adequate technical guidelines, and increasing ecological pressure in Komodo National Park and coastal areas. Tourism supervision is still carried out partially and has not fully adopted sustainability principles, resulting in a gap between policy standards and actual practices in the field. This study highlights the need to strengthen multi-stakeholder governance, integrate monitoring mechanisms, and apply conservation-based supervision to ensure that Labuan Bajo's tourism development remains safe and sustainable.

***Keywords**: Presidential Regulation 63/2014, tourism supervision, Labuan Bajo, policy implementation, sustainable tourism.*

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 271
DOI : Prefix DOI : 10.8734/panorama.v1i1.1395
Copyright : Author
Publish by : Panorama

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia menempatkan pengembangan destinasi wisata unggulan sebagai prioritas melalui penetapan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), salah satunya adalah Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini memiliki daya tarik wisata berkelas internasional seperti Taman Nasional Komodo, ekosistem pesisir yang kaya, serta panorama alam yang unik. Namun, percepatan pembangunan dan meningkatnya jumlah wisatawan memunculkan tantangan serius terkait pengawasan, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola destinasi.

Sebagai respons terhadap kebutuhan pengaturan dan pengendalian aktivitas wisata, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisataan. Regulasi ini mengatur mekanisme pengawasan usaha pariwisata, pelayanan wisatawan, fasilitas, keamanan, serta perlindungan terhadap daya tarik wisata. Dalam konteks Labuan Bajo yang merupakan kawasan strategis dan sensitif secara ekologis, pelaksanaan pengawasan menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, maupun degradasi kualitas layanan wisata.

Meskipun Perpres 63/2014 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasinya di tingkat daerah belum optimal. Beberapa penelitian mencatat adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, BPOLBF, dan pengelola Taman Nasional Komodo. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia pengawasan, serta lemahnya penegakan standar pada usaha wisata, terutama terkait keselamatan transportasi wisata bahari, sanitasi, dan perlindungan lingkungan. Pertumbuhan kunjungan wisatawan yang pesat juga meningkatkan tekanan terhadap daya dukung kawasan, termasuk kerentanan terumbu karang, sampah laut, dan gangguan habitat satwa endemik.

Dalam situasi tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 diterapkan di Labuan Bajo berdasarkan bukti ilmiah dan temuan penelitian sebelumnya. Pendekatan kajian literatur sistematis (SLR) menjadi relevan untuk menilai pola implementasi kebijakan, efektivitas mekanisme pengawasan, peran tata kelola multipihak, serta sejauh mana prinsip pariwisata berkelanjutan diterapkan dalam pengelolaan kawasan wisata.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Perpres 63/2014, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola dan keberlanjutan pariwisata di Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas nasional.

Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisataan pada pengelolaan kawasan wisata Labuan Bajo berdasarkan kajian literatur sistematis (SLR)?

Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan implementasi Perpres 63/2014 pada destinasi Labuan Bajo.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengawasan kepariwisataan.
3. Memberikan rekomendasi penguatan pengawasan berbasis prinsip keberlanjutan.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

LANDASAN TEORI

Landasan teori ini disusun untuk memberikan dasar konseptual dalam menganalisis pelaksanaan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisataan pada pengelolaan kawasan wisata Labuan Bajo. Sejumlah teori dipilih secara spesifik untuk menjelaskan dinamika implementasi kebijakan, mekanisme pengawasan, prinsip keberlanjutan pariwisata, serta tata kelola dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi wisata strategis nasional. Dengan pemahaman teoritis ini, penelitian dapat menilai sejauh mana kebijakan nasional mampu diterapkan secara efektif di tingkat daerah.

1. **Teori Implementasi Kebijakan Publik**

   Implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan aturan dan tujuan pemerintah menjadi tindakan nyata oleh para pelaksana di lapangan (Nugroho, 2017). Dalam konteks ini, pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 menjadi kerangka hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan kegiatan kepariwisataan.

   a. Model Implementasi *Van Meter & Van Horn* (1975)

      Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh enam faktor:

      1. Standar dan tujuan kebijakan,
      2. Sumber daya,
      3. Komunikasi antarorganisasi,
      4. Karakteristik badan pelaksana,
      5. Kondisi sosial, ekonomi, politik,
      6. Disposisi pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975).

      Model ini relevan karena Perpres 63/2014 memiliki standar jelas tentang pengawasan pariwisata, sementara pelaksanaannya melibatkan koordinasi antara Kemenparekraf, Pemkab Manggarai Barat, dan BPOLBF.

   b. Model Implementasi Grindle (1980)

      Grindle (1980) membagi implementasi kebijakan menjadi dua aspek:

      1. *Content of Policy* (isi kebijakan), sejauh mana kebijakan mengatur perubahan, distribusi manfaat, dan target yang ingin dicapai.
      2. *Context of Implementation* (konteks pelaksanaan), meliputi kekuatan politik lokal, kualitas birokrasi, dan dukungan masyarakat.

      Dalam konteks Labuan Bajo, faktor eksternal seperti tekanan investor, perkembangan destinasi super prioritas, dan dinamika masyarakat adat memengaruhi efektivitas pelaksanaan Perpres.

2. **Teori Pengawasan (*Supervision Theory*) dalam Sektor Pariwisata**

   Pengawasan dalam administrasi publik merupakan proses memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar, regulasi, dan tujuan yang telah ditetapkan (Siagian, 2011). Dalam kepariwisataan, pengawasan mencakup:

   a. Usaha pariwisata,
   b. Destinasi pariwisata,
   c. Aktivitas wisatawan,
   d. Pelaku wisata.

   Perpres No. 63/2014 menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan pengawasan terhadap fasilitas, daya tarik, pelayanan, dan keamanan wisatawan. Teori pengawasan ini menjadi dasar analisis implementasi kebijakan pada kawasan wisata Labuan Bajo.

3. **Teori Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)**

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

Konsep pariwisata berkelanjutan bertujuan memastikan bahwa kegiatan wisata memenuhi tiga pilar utama:

a. Keberlanjutan lingkungan,
b. Keberlanjutan sosial-budaya,
c. Keberlanjutan ekonomi (UNWTO, 2018).

Labuan Bajo merupakan kawasan prioritas nasional yang sensitif secara ekologis termasuk Pulau Komodo, padang savana, dan wilayah pesisir sehingga pengawasan berdasarkan Perpres sangat krusial untuk menjaga daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), mencegah overtourism, dan melindungi konservasi.

4. Tata Kelola Pariwisata (*Tourism Governance*)

Tata kelola (*governance*) menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antarpemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengelola destinasi (Hall, 2011). Prinsip *governance* meliputi:

a. akuntabilitas,
b. transparansi,
c. partisipasi,
d. efektivitas.

Dalam Labuan Bajo, tata kelola melibatkan banyak aktor, sehingga teori governance membantu menganalisis peran, kewenangan, serta tantangan dalam pelaksanaan Perpres No. 63/2014.

5.* Teori *Collaborative Governance

Collaborative governance adalah model tata kelola yang menekankan proses pengambilan keputusan secara bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Ansell & Gash, 2007). Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh:

a. kepercayaan antaraktor,
b. dialog tatap muka,
c. komitmen bersama,
d. kesetaraan peran.

Dalam pengelolaan Labuan Bajo, kolaborasi menjadi penting karena aktivitas pariwisata melibatkan BPOLBF, Pemda, pelaku usaha, masyarakat adat, dan pemerintah pusat. Teori ini membantu menjelaskan mengapa pengawasan sering kali tidak optimal jika tidak ada koordinasi yang efektif.

Secara keseluruhan, teori-teori di atas memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menilai efektivitas pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 di Labuan Bajo. Teori implementasi kebijakan menjelaskan faktor keberhasilan pelaksanaan, teori pengawasan memberikan pedoman evaluasi terhadap fungsi kontrol pemerintah, konsep pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya perlindungan lingkungan, sementara tata kelola dan *collaborative governance* menyoroti peran koordinasi multipihak. Kombinasi perspektif tersebut menjadi dasar dalam memahami tantangan dan peluang pengawasan pariwisata di kawasan prioritas nasional ini.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisataan di kawasan wisata Labuan Bajo berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang sudah tersedia.
Melalui studi literatur, peneliti dapat:

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

1. Mengkaji teori-teori yang relevan dengan implementasi kebijakan dan pengawasan pariwisata.
2. Mengumpulkan temuan empiris dari penelitian terdahulu terkait tata kelola dan pengelolaan destinasi Labuan Bajo.
3. Membandingkan antara ketentuan kebijakan dalam Perpres dan kondisi yang dijelaskan pada penelitian ilmiah.

Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan kepariwisataan di Labuan Bajo tanpa melakukan penelitian lapangan.

Sumber data dan Cara Mengumpulkan Data

Sumber data penelitian terdiri atas:

1. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan implementasi kebijakan pariwisata, pengawasan kegiatan kepariwisataan, pariwisata berkelanjutan, *governance* dan kolaborasi multipihak, pengelolaan destinasi Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo.
2. Dokumen kebijakan, yang meliputi:
    a. Perpres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisataan,
    b. RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional),
    c. Laporan resmi BPOLBF,
    d. Publikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
    e. Regulasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan pariwisata.
3. Artikel ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi lembaga pemerintahan yang mendukung topik analisis

Data dikumpulkan melalui penelusuran pada platform seperti *Google Scholar*, DOAJ, Portal Garuda, Sinta, dan jurnal universitas. Total 20 jurnal digunakan sebagai bahan utama analisis.

Kriteria Pemilihan Jurnal

Penentuan jurnal menggunakan pendekatan PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*) untuk menjaga fokus penelitian.

Komponen	Keterangan
Population (P)	Pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo, DPSP, wisatawan, pelaku usaha, BPOLBF, Pemda, masyarakat lokal.
Intervention (I)	Implementasi Perpres No. 63/2014, pengawasan usaha wisata, layanan, keamanan wisatawan, konservasi, *governance*.
Comparison (C)	Perbandingan dengan destinasi lain, standar UNWTO, atau kebijakan pengawasan nasional.
Outcome (O)	Efektivitas pengawasan pariwisata, perlindungan lingkungan, keselamatan wisatawan, tata kelola multipihak.

Kriteria jurnal yang digunakan (inklusi):

1. Jurnal membahas implementasi kebijakan, *governance*, atau pengawasan pariwisata.
2. Relevan dengan konteks Labuan Bajo atau destinasi prioritas Indonesia.
3. Menggunakan metode penelitian yang jelas.
4. Mencakup topik keberlanjutan, konservasi, atau daya dukung lingkungan.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

Kriteria jurnal yang tidak digunakan (eksklusi):

1. Tidak relevan dengan pengawasan pariwisata.
2. Tidak memiliki metodologi ilmiah.
3. Hanya membahas aspek promosi atau ekonomi murni.
4. Tidak terkait kebijakan pariwisata atau governance.

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam studi literatur ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa proses analisis berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan tersebut meliputi:

1. **Identifikasi isu dan fokus penelitian**
   Tahap awal dilakukan dengan menentukan isu utama, yaitu bagaimana implementasi Perpres No. 63 Tahun 2014 diterapkan dalam pengawasan kegiatan kepariwisataan di kawasan wisata Labuan Bajo.
2. **Pengumpulan referensi**
   Peneliti mengumpulkan berbagai sumber ilmiah berupa 20 jurnal, buku, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan yang relevan, khususnya yang membahas implementasi kebijakan pariwisata, *governance*, kolaborasi multipihak, dan pengelolaan destinasi Labuan Bajo.
3. **Klasifikasi jurnal berdasarkan tema**
   Jurnal yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, seperti:
   a. implementasi kebijakan.
   b. pengawasan kepariwisataan,
   c. pariwisata berkelanjutan,
   d. tata kelola dan *governance*,
   e. *collaborative governance*,
   f. dinamika pengelolaan kawasan Labuan Bajo.
4. **Analisis isi (*content analysis*)**
   Setiap jurnal dianalisis untuk mengidentifikasi temuan penting, pola permasalahan, serta faktor
5. **Penyusunan sintesis**
   Hasil analisis teori dan literatur kemudian disusun menjadi sintesis yang menggambarkan hubungan antara peraturan, praktik pengawasan, dan kondisi faktual di Labuan Bajo.
6. **Penarikan kesimpulan**
   Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan Perpres No. 63/2014 serta tantangan yang muncul dalam pengawasan pariwisata di Labuan Bajo

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) yang bertujuan menemukan pola, hubungan, dan tema-tema utama dari 20 jurnal yang telah ditelaah. Proses analisis diawali dengan mengelompokkan seluruh jurnal ke dalam lima tema besar, yaitu implementasi kebijakan pariwisata, tata kelola dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, pengawasan sektor pariwisata, pariwisata berkelanjutan dan konservasi, serta dinamika pengelolaan destinasi Labuan Bajo. Pengelompokan tematik ini membantu peneliti melihat isu-isu dominan dalam literatur yang berkaitan dengan pengawasan kepariwisataan.

Proses analisis dilanjutkan dengan menelaah isi setiap jurnal untuk mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan temuan. Setiap argumen, hasil penelitian, dan fokus kajian dibandingkan guna memahami pola konsisten yang muncul, keragaman perspektif, serta kontribusi masing-masing jurnal terhadap topik implementasi pengawasan pariwisataan di Labuan Bajo.Analisis tematik dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres No. 63 Tahun

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

2014 untuk menilai kesesuaian antara peraturan dan praktik pengawasan yang dilaporkan dalam literatur. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai efektivitas mekanisme pengawasan, bagian yang telah berjalan sesuai regulasi, serta area yang belum optimal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal.

Proses analisis diakhiri dengan penyusunan hasil dalam bentuk pembahasan yang sistematis. Hasil tersebut menggambarkan pelaksanaan Perpres 63/2014 secara komprehensif, termasuk tantangan dan peluang dalam pengawasan pariwisata di Labuan Bajo berdasarkan temuan literatur yang dianalisis.

Proses Seleksi Jurnal (model Prisma)

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis dengan pendekatan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagaimana dirumuskan oleh Moher et al. (2009). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan proses seleksi jurnal dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi ketika menganalisis implementasi Perpres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisataan pada pengelolaan kawasan wisata Labuan Bajo.

1. **Identifikasi (*Identification*)**

   Proses identifikasi dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah, yakni Google Scholar, GARUDA, SINTA, dan DOAJ. Kata kunci pencarian meliputi: *pengawasan kepariwisataan, pariwisata berkelanjutan, Labuan Bajo, policy implementation tourism, dan sustainable tourism Indonesia*. Berdasarkan hasil penelusuran awal, diperoleh:
   a. Google Scholar : 45 artikel
   b. GARUDA : 18 artikel
   c. SINTA : 12 artikel
   d. DOAJ : 9 artikel

   Total artikel yang teridentifikasi pada tahap awal adalah **84 artikel**.

2. **Penyaringan (*Screening*)**

   Penyaringan dilakukan berdasarkan judul dan abstrak untuk memastikan relevansi artikel dengan fokus penelitian. Kriteria utama penyaringan mencakup tema:
   a. kebijakan pariwisata berkelanjutan,
   b. pengawasan kepariwisataan,
   c. pengelolaan destinasi super prioritas,
   d. tata kelola pariwisata Labuan Bajo,
   e. implementasi regulasi kepariwisataan.

   Sebanyak **49 artikel** dieliminasi pada tahap ini karena tidak relevan misalnya pembahasan yang hanya berfokus pada ekonomi murni, wisata kuliner, pemasaran destinasi, atau pariwisata yang tidak berkaitan dengan aspek pengawasan dan kebijakan. Jumlah artikel tersisa setelah proses screening adalah **35 artikel**.

3. **Kelayakan *(Eligibility*)**

   Artikel tersisa dibaca secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria metodologis dan substansi. Kriteria kelayakan meliputi:
   a. memiliki fokus pada kebijakan pariwisata, governance, atau keberlanjutan,
   b. menggunakan metode penelitian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,
   c. membahas konteks Indonesia atau destinasi prioritas nasional,
   d. relevan dengan isu implementasi dan pengawasan pariwisata.

   Sebanyak 15 artikel dieliminasi pada tahap ini karena tidak menyediakan data analitis

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

yang memadai atau hanya berupa opini tanpa metodologi. Jumlah artikel yang lolos tahap kelayakan adalah 20 artikel.

4. **Inklusi (*Included*)**

Sebanyak **20 artikel** yang memenuhi seluruh kriteria PRISMA dijadikan dasar utama dalam analisis. Jurnal-jurnal ini digunakan untuk:

a. menilai pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 dalam konteks Labuan Bajo,
b. mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan pengawasan kepariwisataan,
c. mengkaji peran tata kelola, kolaborasi, serta prinsip pariwisata berkelanjutan,
d. menyusun gambaran komprehensif mengenai pengelolaan destinasi super prioritas.

Pendekatan PRISMA memastikan bahwa seluruh literatur yang dianalisis memiliki validitas akademik dan relevansi yang tinggi terhadap fokus penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Literatur

Hasil telaah terhadap 20 jurnal menunjukkan bahwa pengawasan kepariwisataan di Labuan Bajo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu efektivitas implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kondisi lingkungan yang sensitif. Literatur secara umum menegaskan bahwa Perpres No. 63 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pariwisata, namun pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah kendala.

Temuan literatur menunjukkan bahwa implementasi pengawasan sering terkendala oleh perbedaan pemahaman antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya komunikasi antara pemerintah pusat, BPOLBF, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Kesiapan organisasi pelaksana menjadi isu penting karena pengawasan melibatkan tugas pemantauan usaha wisata, standar pelayanan, keamanan wisatawan, dan perlindungan daya tarik wisata. Beberapa penelitian mencatat bahwa koordinasi pengawasan belum berjalan sepenuhnya terpadu sehingga memengaruhi konsistensi pengendalian aktivitas wisata di kawasan Labuan Bajo.

Aspek keberlanjutan lingkungan menjadi fokus yang banyak dibahas dalam literatur. Labuan Bajo merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi, terutama pada wilayah Taman Nasional Komodo, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil. Jurnal-jurnal yang dianalisis menekankan bahwa peningkatan jumlah wisatawan memerlukan pengawasan ketat terhadap daya dukung kawasan, pengaturan aktivitas wisata bahari, dan pengendalian dampak lingkungan seperti sampah dan tekanan terhadap habitat satwa. Pengawasan berbasis konservasi dinilai penting agar pengembangan pariwisata tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata yang melibatkan banyak aktor membutuhkan koordinasi dan mekanisme kolaborasi yang kuat. Beberapa jurnal menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan akan lebih efektif apabila pemerintah, BPOLBF, pelaku usaha, dan masyarakat lokal memiliki peran yang jelas serta bekerja dalam kerangka kolaboratif. Tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan kurangnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan di kawasan ini.

Sebagian besar literatur menyimpulkan bahwa pengawasan kepariwisataan di Labuan Bajo memiliki potensi untuk menjadi lebih baik apabila implementasi Perpres dilakukan secara konsisten, didukung oleh kapasitas pelaksana yang memadai, serta berbasis pada prinsip pariwisata berkelanjutan. Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa penguatan koordinasi, peningkatan kualitas SDM pengawasan, serta komitmen terhadap perlindungan lingkungan merupakan faktor kunci dalam memastikan pengelolaan pariwisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Labuan Bajo.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

Hasil Analisis Jurnal

Hasil analisis terhadap 20 jurnal yang telah diklasifikasikan berdasarkan tema menunjukkan bahwa implementasi Perpres No. 63 Tahun 2014 pada pengawasan kepariwisataan di Labuan Bajo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Analisis dilakukan melalui tahap identifikasi isu, pengelompokan tematik, analisis isi, dan penyusunan sintesis. Temuan literatur kemudian dipetakan ke dalam lima tema besar: implementasi kebijakan, pengawasan kepariwisataan, keberlanjutan lingkungan, tata kelola dan kolaborasi multipihak, serta dinamika pengelolaan Labuan Bajo.

1. **Implementasi Kebijakan Pengawasan Pariwisata**

   Analisis literatur menunjukkan bahwa Perpres No. 63/2014 telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pariwisata, pelayanan wisatawan, fasilitas pendukung, dan keamanan. Namun, sebagian besar jurnal menemukan bahwa implementasi kebijakan di Labuan Bajo belum sepenuhnya berjalan efektif. Tantangan muncul dari perbedaan pemahaman antarlembaga pelaksana, belum optimalnya mekanisme koordinasi, serta keterbatasan pedoman teknis yang seharusnya mendukung pelaksanaan pengawasan.

   Beberapa jurnal yang fokus pada implementasi kebijakan mencatat bahwa pengawasan sering dilakukan secara insidental, belum berbasis pada perencanaan pengawasan jangka panjang, dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan agenda pembangunan pariwisata daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Perpres dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

2. **Pengawasan Kepariwisataan dan Praktik di Lapangan**

   Jurnal-jurnal yang membahas pengawasan pariwisata menekankan bahwa pengawasan terhadap usaha wisata, standar pelayanan, dan keselamatan wisatawan masih menghadapi kendala operasional. Pelaksanaan pengawasan oleh Pemkab Manggarai Barat, BPOLBF, dan Kemenparekraf belum berjalan secara terpadu sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas dan kurangnya kesinambungan dalam kegiatan monitoring.

   Analisis juga menemukan bahwa beberapa pelaku usaha belum sepenuhnya mematuhi standar pengawasan, terutama terkait perizinan, kelayakan sarana wisata bahari, dan keselamatan transportasi wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa isi Perpres 63/2014, khususnya mengenai kewajiban pengawasan, belum seluruhnya terealisasi dalam praktik.

3. **Keberlanjutan Lingkungan dan Daya Dukung Kawasan**

   Sebagian besar jurnal menekankan bahwa Labuan Bajo merupakan kawasan dengan tingkat kerentanan ekologis tinggi. Literature review menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan, kepadatan kapal wisata, dan intensitas aktivitas di Taman Nasional Komodo telah memberikan tekanan besar terhadap ekosistem pesisir dan darat.

   Analisis menemukan bahwa isu daya dukung kawasan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan. Beberapa penelitian mencatat bahwa pembatasan kunjungan, pengaturan jalur wisata, dan pengelolaan sampah belum diintegrasikan secara konsisten dalam kebijakan pengawasan. Temuan ini relevan dengan mandat Perpres yang mewajibkan pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan kepariwisataan tidak merusak daya tarik wisata.

4. **Tata Kelola, Koordinasi, dan Kolaborasi Multipihak**

   Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa pengawasan pariwisata di Labuan Bajo bergantung pada koordinasi antara banyak aktor: Kemenparekraf, BPOLBF, Pemkab Manggarai Barat, TN Komodo, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Beberapa jurnal menyebutkan bahwa

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

belum adanya mekanisme koordinasi yang konsisten membuat pelaksanaan pengawasan berjalan terpisah-pisah dan tidak saling mendukung.

Jurnal yang mengkaji *governance dan collaborative governance* menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat diperlukan untuk memadukan kewenangan pusat daerah, menjaga konsistensi kebijakan, dan memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan. Rendahnya integrasi kebijakan menjadi salah satu penyebab lemahnya implementasi Perpres di lapangan.

5. Dinamika Pengelolaan dan Tantangan Pengawasan di Labuan Bajo

Analisis jurnal menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat pariwisata Labuan Bajo membawa tantangan baru, seperti tekanan investor terhadap ruang wisata, rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, minimnya teknologi pendukung monitoring, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Beberapa jurnal menjelaskan bahwa masalah ini menghambat efektivitas pengawasan, terutama dalam mengendalikan aktivitas wisata bahari, penggunaan ruang pesisir, dan aktivitas komersial di kawasan konservasi.

Hasil analisis juga memperlihatkan adanya gap antara ketentuan Perpres dan kondisi aktual di lapangan. Perpres telah mengatur kewajiban pemerintah dalam pengawasan, tetapi realisasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan norma yang ditetapkan, terutama dalam aspek penegakan standar dan perlindungan lingkungan.

Sintesis Temuan Literatur

Sintesis dari seluruh jurnal menunjukkan tiga poin utama:

1. Perpres 63/2014 memiliki kerangka pengawasan yang kuat, tetapi implementasinya di Labuan Bajo masih belum optimal karena kendala koordinasi, sumber daya, dan kesiapan organisasi pelaksana.
2. Keberlanjutan lingkungan menjadi isu paling penting, di mana pengawasan belum sepenuhnya digunakan sebagai instrumen untuk melindungi ekosistem pesisir dan konservasi Taman Nasional Komodo.
3. Tata kelola multipihak menentukan keberhasilan pengawasan, sehingga diperlukan mekanisme kolaboratif yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPOLBF, dan masyarakat.

Interpretasi dan Implikasi

Interpretasi hasil analisis literatur menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 di Labuan Bajo dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknis, kelembagaan, dan ekologis yang saling terkait. Seluruh jurnal mendukung temuan bahwa kebijakan nasional telah menyediakan kerangka dasar pengawasan, namun tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada kesesuaian implementasi di lapangan.

1. Interpretasi terhadap Aspek Implementasi Kebijakan

Analisis literatur memperlihatkan bahwa kebijakan pengawasan telah memiliki standar normatif, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam pedoman operasional daerah. Syafera (2024) menekankan bahwa pembangunan Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) berjalan cepat, sementara kesiapan instrumen pengawasan belum seimbang dengan pertumbuhan industri wisata. Kondisi ini dapat dilihat sebagai bentuk *policy-implementation gap* yang dijelaskan oleh Grindle (1980), di mana isi kebijakan tidak otomatis menghasilkan perubahan apabila konteks pelaksanaan kurang mendukung.

2. Interpretasi terhadap Praktik Pengawasan

Penelitian Diwyarthi dan Prabawati (2022) menunjukkan bahwa pengawasan usaha wisata di Labuan Bajo masih bergantung pada inspeksi *ad-hoc*. Pola ini mencerminkan kelemahan mekanisme monitoring sebagaimana disoroti oleh *Van Meter* dan *Van Horn*

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

(1975), yaitu bahwa komunikasi antarorganisasi dan karakteristik pelaksana menjadi faktor kritis dalam keberhasilan implementasi.

3. **Interpretasi terhadap Aspek Lingkungan dan Daya Dukung**

   Jurnal Khadijah et al. (2025) dan Dionisius et al. (2024) memperlihatkan bahwa tekanan ekologis meningkat signifikan akibat pertumbuhan wisatawan. Kerusakan terumbu karang, meningkatnya sampah laut, dan gangguan habitat Komodo menjadi bukti bahwa unsur pengawasan lingkungan belum berjalan sesuai ketentuan Perpres. Kondisi ini menandakan bahwa prinsip pariwisata berkelanjutan (UNWTO, 2018) belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten.

4. **Interpretasi terhadap Tata Kelola dan Kolaborasi**

   Kamis dan Yusuf (2025) menemukan bahwa koordinasi antaraktor masih bersifat sektoral. Keadaan ini sejalan dengan temuan Leha et al. (2019) yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Labuan Bajo sulit berjalan efektif karena lemahnya koordinasi lintas lembaga. Faktor tersebut menggambarkan rendahnya kualitas *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007) yang seharusnya menjadi prasyarat bagi destinasi super prioritas.

Implikasi

1. **Implikasi Kebijakan**

   Interpretasi literatur menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan perlu dilengkapi dengan peraturan teknis berupa SOP inspeksi kapal wisata, standar sanitasi, dan pedoman pengelolaan limbah. Tanpa perangkat teknis yang rinci, arahan Perpres akan sulit diterjemahkan oleh pelaksana di lapangan.

2. **Implikasi Kelembagaan**

   Ketidaksinergian lembaga BPOLBF, Pemkab Manggarai Barat, Balai Taman Nasional menunjukkan perlunya forum koordinasi permanen. Forum ini dapat menjadi ruang untuk standarisasi penegakan aturan serta pengintegrasian data pengawasan.

3. **Implikasi Lingkungan**

   Kerusakan ekologis yang dilaporkan berbagai jurnal memperkuat kebutuhan penerapan sistem pembatasan wisatawan (*visitor quota*) dan monitoring berbasis teknologi seperti *GIS* atau *smart control system*.

4. **Implikasi Sosial dan Ekonomi**

   Keterlibatan masyarakat lokal harus ditingkatkan dalam *co-monitoring* pariwisata, karena beberapa jurnal menunjukkan bahwa pelibatan komunitas mampu meningkatkan kepatuhan pelaku wisata terhadap aturan konservasi.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

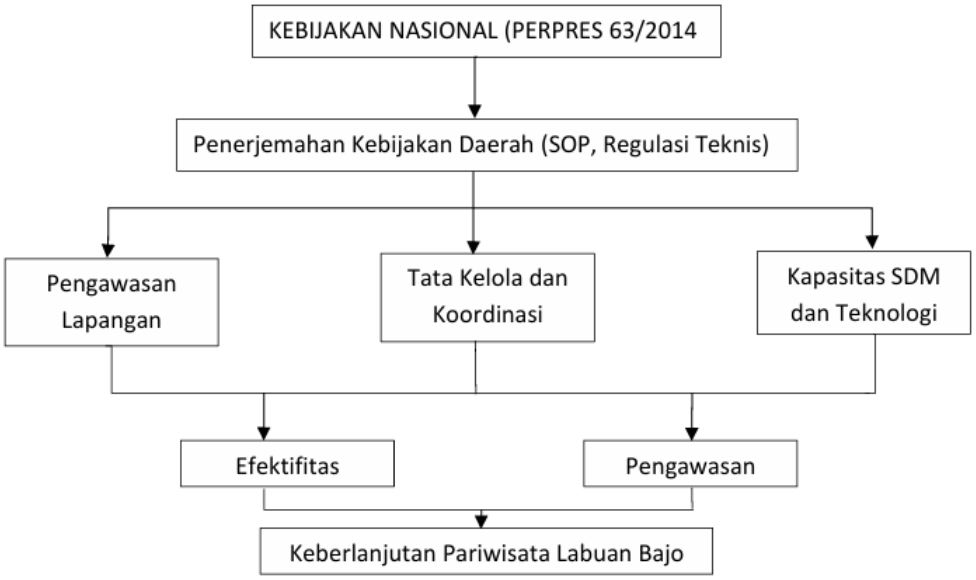


Diagram ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada koordinasi, kapasitas, dan respons terhadap dampak lingkungan yang terus berkembang.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisataan pada kawasan wisata Labuan Bajo telah memiliki dasar hukum yang kuat namun belum diterapkan secara optimal di tingkat daerah. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan teknis, kelembagaan, dan ekologis yang memengaruhi efektivitas pengawasan pariwisata. Kendala utama terletak pada lemahnya penerjemahan standar Perpres ke dalam pedoman operasional, terbatasnya koordinasi antarinstansi pelaksana, serta kurangnya konsistensi dalam monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas usaha wisata dan layanan wisatawan.

Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa pengawasan sering dilakukan secara insidental dan belum berbasis pada perencanaan jangka panjang. Kualitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, di mana aparatur pengawas belum sepenuhnya memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk melakukan kontrol terhadap usaha wisata, keamanan transportasi wisata bahari, maupun pengelolaan fasilitas pariwisata. Ketidaksinergian antar pemangku kepentingan Kemenparekraf, BPOLBF, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan Balai Taman Nasional Komodo menjadi faktor penting yang turut melemahkan efektivitas implementasi Perpres.

Aspek lingkungan menjadi isu paling menonjol dalam keseluruhan literatur. Banyak jurnal menegaskan bahwa tekanan ekologis di Labuan Bajo, terutama pada Taman Nasional Komodo dan kawasan pesisir, telah meningkat signifikan akibat pertumbuhan wisatawan dan aktivitas wisata bahari. Pengawasan berbasis konservasi belum diterapkan secara konsisten sehingga daya dukung kawasan belum menjadi acuan kuat dalam pengendalian aktivitas wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Perpres telah mengamanatkan perlindungan terhadap daya tarik wisata, implementasinya masih belum sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Sintesis literatur memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan pariwisata sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola multipihak. Ketidakjelasan pembagian peran, lemahnya kolaborasi, dan tidak adanya mekanisme koordinasi permanen menyebabkan pengawasan berjalan

parsial dan tidak saling melengkapi. Dengan demikian, implementasi Perpres No. 63 Tahun 2014 pada pengelolaan kawasan wisata Labuan Bajo memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, teknis operasional, dan pendekatan ekologis agar tujuan pengawasan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

Peningkatan pelaksanaan Perpres No. 63 Tahun 2014 pada kawasan wisata Labuan Bajo memerlukan pembenahan pada aspek kebijakan operasional. Pemerintah pusat dan daerah disarankan menyusun pedoman teknis yang lebih rinci, seperti SOP inspeksi kapal wisata, standar keselamatan wisatawan, serta mekanisme pengawasan usaha wisata berbasis risiko. Penyusunan pedoman tersebut menjadi penting agar pelaksana di lapangan memiliki acuan yang seragam, jelas, dan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Penguatan kelembagaan perlu menjadi prioritas dengan membentuk forum koordinasi permanen antara Kemenparekraf, BPOLBF, Pemkab Manggarai Barat, dan Balai Taman Nasional Komodo. Forum ini diharapkan menjadi wadah integrasi data pengawasan, harmonisasi kewenangan, dan penyusunan agenda monitoring yang terpadu. Upaya peningkatan kapasitas SDM pengawas melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta penguasaan teknologi monitoring digital juga menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pengawasan di lapangan.

Perlindungan lingkungan harus menjadi bagian utama dalam pengawasan pariwisata. Pemerintah perlu menerapkan sistem pembatasan jumlah wisatawan *(visitor quota*), memperketat pengaturan lalu lintas kapal wisata, serta menerapkan monitoring ekologis berkala di kawasan sensitif seperti Komodo, Padar, dan wilayah pesisir. Pengawasan berbasis konservasi harus menjadi instrumen wajib demi menjaga keberlanjutan pariwisata jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat lokal perlu diperkuat melalui pelibatan dalam kegiatan *co-monitoring*, pengawasan informal berbasis komunitas, serta peningkatan literasi terhadap konservasi. Peran masyarakat dalam pengawasan terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha wisata terhadap aturan dan memperkuat tata kelola destinasi. Dengan menggabungkan pendekatan kebijakan, kelembagaan, teknologi, dan partisipasi masyarakat, pengawasan kepariwisataan di Labuan Bajo dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pengembangan pariwisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adamy, M., Wiradharma, G., Prasetyo, M. A., Soko, I. P., & Igiriza, M. (2025). Pengembangan Pengawasan Wisata Berbasis Masyarakat di Labuan Bajo. *Jurnal Pariwisata Indonesia*.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bian, M., Murdana, I. M., & Kurniansah, R. (2022). Analisis penerapan prinsip pariwisata bertanggung jawab di destinasi wisata bahari. *Journal of Responsible Tourism, 1*(3), 281–290. https://ejournal.stpmataram.ac.id/JRT/article/view/1371

Cahyowati, R. R., Asmara, G., & Wibowo, G. D. H. (2022). Penguatan kebijakan pembangunan pariwisata daerah berbasis potensi lokal. *UJCS: Unram Journal of Community Service*. https://jurnalpasca.unram.ac.id/index.php/UJCS/article/download/396/90

Delarista, S., Puspaningtyas, A., & Wahyudi, E. (2025). Analisis praktik wisata berkelanjutan di https://www.aksiologi.org/index.php/ praja/article/download/2278/1556

Dionisius, H., Amini, D. S., & Subandi, Y. (2024). Transformasi pariwisata biru Labuan Bajo. *Innovative Journal* https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/13373/9084

Diwyarthi, N. D. M. S., & Prabawati, N. P. D. (2022). Manajemen Pondok Wisata di Labuan Bajo. *Prosiding ADPI*. https://prosiding.adpi-indonesia.id/index.php/semnas/article/download/42/36

Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691021801/politics-and-policy-implementation-in-the-third-world

Hall, C. M. (2011). A typology of governance and its implications for tourism policy analysis. *Journal of Sustainable Tourism*. https://doi.org/10.1080/09669582.2011.598229

Junianto, A. B. (2021). Strategi pengembangan karya kreatif dalam mendukung pariwisata http://repository.podomorouniversity.ac.id/435/1/Strategi%20Pengembangan%20Karya%20Kreatif.pdf

Khadijah, S. A. R., Ayu, J. P., Wibowo, Y. P. P., Hamdani, A. R. T., & Rachmawati, D. (2025). Implementasi konsep pariwisata berkelanjutan pada destinasi prioritas nasional. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation (JITHOR), 8*(1), 79–95. https://ejournal.upi.edu/index.php/Jithor/article/view/79010

Khadijah, S. A. R., et al. (2025). Konservasi Ekosistem Darat di TN Komodo. *JITHOR*. https://ejournal.upi.edu/index.php/Jithor/article/view/79010

Kamis, A., & Yusuf, M. (2025). Tantangan Tata Kelola Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*.

Kamis, W. A. B., & Yusuf, H. (2025). Pengembangan pariwisata daerah melalui pendekatan kolaborasi multipihak. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 2*(3), 4519–4527. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/4471

Leha, E., Wolo, D., Marselina, A., & Parera, H. R. (2019). Manajemen sampah dan keberlanjutan pariwisata Labuan Bajo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Kesehatan_Masyarakat/article/download/995/1229

Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (Edisi Revisi). PT Elex Media Komputindo. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1129516

Obot, F., & Setyawan, D. (2017). Pengaruh pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/1469/1043

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kepariwisataan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38679/perpres-no-63-tahun-2014

Purwanto, D., Semara, I. M. T., & Sutiarso, M. A. (2023). Analisis implementasi program WWF Signing Blue berlandaskan konsep pariwisata bertanggung jawab pada wisata bahari Labuan Bajo. *PARIS (Jurnal Pariwisata dan Bisnis), 2*(2). https://www.academia.edu/100198449

Saputra, I. P. D. A. (2024). Pentingnya pariwisata berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/4613

Setiawati, S., & Ramdani, D. (2025). Dampak perkembangan destinasi super prioritas terhadap keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Kesehatan Olahraga Indonesia (JUKONI)*. https://sihojurnal.com/index.php/jukoni/article/download/627/414

Siagian, S. P. (2011). *Manajemen Modern*. Bumi Aksara. https://www.bumiaksaraonline.com/

Sugiarto, A., & Mahagangga, I. G. A. O. (2020). Kendala pengembangan pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Destinasi Pariwisata, 8*(1), 1–15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/view/61842

Syafera, A. (2024). Pengembangan DSP Labuan Bajo: Quantum Leap. *Jurnal Nasional Pariwisata*. https://journal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/25-41

Syafera, A. (2024). Pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas sebagai strategi keberlanjutan https://journal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/25-41

Umul, D. S., Dae, Y. E. I., Sufitrianingsih, I., & Berybe, G. A. (2025). Transformasi pariwisata

berkelanjutan di Labuan Bajo. *Innovative Journal*. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/18112/12229

UNWTO. (2018). *Tourism for Sustainable Development Goals*. https://www.unwto.org/tourism-and-sdgs

Van Meter, D., & Van Horn, B. (1975). The policy implementation process. *Administration & Society, 6*(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata https://www.semanticscholar.org/paper/067cac860f410bac77e9e2f4ccac5b472e70b3a7

Widari, D. A. D. S. (2020). *Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/67470840/1._Dr._Dewa_Ayu_Diyah-libre.pdf